

PERUBAHAN FUNGSI HUTAN MENJADI PERKEBUNAN SAWIT DI KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2000–2020

Nurwaidah¹, Putri Dahlia Adha², Fatonah³, Padhil Hudaya⁴
nurwaidaah18@gmail.com¹, putridahlia1922@gmail.com², fatonah.nurdin@unja.ac.id³,
padhilhudaya@unja.ac.id⁴

Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2000–2020. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin luasnya pemanfaatan lahan untuk perkebunan sawit yang menyebabkan berkurangnya tutupan hutan dan berubahnya kehidupan masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan kondisi awal hutan, proses perubahan fungsi hutan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui tahapan pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan berupa data BPS Kabupaten Muaro Jambi, laporan penelitian, dokumen SESA Jambi, jurnal ilmiah, serta sumber tertulis lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan fungsi hutan berlangsung secara bertahap melalui pembukaan lahan, perluasan perkebunan rakyat dan perusahaan, serta peralihan masyarakat dari karet dan hasil hutan ke kelapa sawit. Perubahan ini memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan pendapatan sebagian masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan seperti berkurangnya hutan, terganggunya tata air, serta meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap sawit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan fungsi hutan di Muaro Jambi merupakan proses historis yang berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi dan perubahan lingkungan.

Kata Kunci: Perubahan Fungsi Hutan, Kelapa Sawit, Muaro Jambi, Deforestasi, Sejarah Lingkungan.

ABSTRACT

This study examines the conversion of forest land into oil palm plantations in Muaro Jambi Regency from 2000 to 2020. The background of this research is based on the increasing expansion of land use for oil palm cultivation, which has led to a reduction in forest cover and changes in the livelihoods of surrounding communities. This study aims to explain the initial condition of the forests, the process of forest conversion, and its environmental, economic, and social impacts on local communities. The research employs the historical method, consisting of topic selection, heuristics, source verification, interpretation, and historiography. The sources used include statistical data from Muaro Jambi Regency, research reports, Jambi SESA documents, scientific journals, and other relevant written sources. The findings indicate that forest conversion occurred gradually through land clearing, the expansion of both smallholder and corporate oil palm plantations, and the shift of local livelihoods from rubber cultivation and forest-based activities to oil palm farming. This transformation generated economic benefits, including increased income for some community members. However, it also resulted in environmental consequences, such as forest loss, disruption of water systems, and growing dependence on oil palm cultivation. The study concludes that forest conversion in Muaro Jambi was a historical process closely linked to economic interests and environmental change.

Keywords: Forest Conversion, Oil Palm Plantations, Muaro Jambi, Deforestation, Environmental History..

PENDAHULUAN

Perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu persoalan penting dalam sejarah lingkungan di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu wilayah yang mengalami perubahan

penggunaan lahan cukup besar karena memiliki bentang wilayah yang luas, tanah yang subur, kawasan dataran rendah, serta wilayah yang sejak lama dimanfaatkan untuk pertanian, kehutanan, perkebunan, dan permukiman. Secara administratif, Kabupaten Muaro Jambi memiliki luas sekitar 5.264 km² dan terdiri atas 11 kecamatan, dengan Kecamatan Kumpeh sebagai kecamatan terluas (Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, 2020, hal. 8:). Kondisi geografis tersebut menjadikan Muaro Jambi sebagai ruang yang strategis bagi pengembangan sektor perkebunan, terutama kelapa sawit.

Sebelum perkebunan sawit berkembang luas, hutan di Muaro Jambi memiliki fungsi penting bagi lingkungan dan masyarakat. Hutan berperan sebagai pengatur tata air, penjaga kesuburan tanah, penyedia hasil hutan, serta bagian dari ruang hidup masyarakat sekitar. Pada awal tahun 2000-an, kegiatan ekonomi masyarakat masih banyak bertumpu pada pertanian, perkebunan karet, hasil hutan, perikanan sungai, dan kebun campuran. Simamora menjelaskan bahwa karet sudah lama menjadi andalan perekonomian penduduk Muaro Jambi, meskipun setelah kelapa sawit berkembang banyak masyarakat mulai beralih menjadi petani sawit (Simamora, 2007, hal. 16–17). Peralihan ini menunjukkan bahwa perubahan fungsi hutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan fisik lahan, tetapi juga berhubungan dengan perubahan mata pencaharian dan orientasi ekonomi masyarakat.

Perkembangan studi terbaru menunjukkan bahwa ekspansi kelapa sawit di Jambi memiliki dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, sawit memberikan manfaat ekonomi karena dianggap lebih menguntungkan dan praktis dibandingkan komoditas lain. Di sisi lain, ekspansi tersebut menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial. Azzahra, Dharmawan, dan Pandjaitan menjelaskan bahwa alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit merupakan fenomena yang banyak terjadi di Provinsi Jambi dan dapat menimbulkan dampak berupa kekeringan, banjir, serta perubahan rasionalitas petani (Fatimah Azzahra, Arya Hadi Dharmawan, 2022, hal. 87–88). Kajian Ma'rufah dkk. juga menunjukkan bahwa Jambi mengalami pergeseran penggunaan lahan yang cepat, dengan perkebunan sawit, permukiman, dan pertanian sebagai kekuatan utama perubahan tersebut (Ma'rufah et al., 2023, hal. 484–485). Sementara itu, Pahmi dkk. menekankan bahwa dampak sosial ekspansi sawit tidak sama pada setiap kelompok masyarakat; kelompok yang bergantung pada hutan cenderung lebih rentan karena akses terhadap sumber daya hutan semakin berkurang (Pahmi et al., 2023, hal. 61–75).

Meskipun kajian tentang sawit, deforestasi, dan dampaknya di Jambi sudah cukup banyak dilakukan, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang secara khusus melihat perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Muaro Jambi dalam rentang waktu 2000–2020 dengan pendekatan sejarah. Beberapa penelitian lebih banyak membahas dampak ekonomi dan lingkungan sawit secara umum di Jambi, proyeksi perubahan penggunaan lahan, atau dampak sosial pada komunitas tertentu. Sementara itu, kajian yang menyusun proses perubahan secara kronologis, mulai dari kondisi awal hutan, perkembangan perkebunan sawit, hingga dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat Muaro Jambi, masih perlu diperkuat. Padahal, penelitian deforestasi menunjukkan bahwa Muaro Jambi termasuk wilayah yang mengalami tekanan hutan cukup serius, dengan penurunan luas hutan pada periode 2005–2013 (Sari et al., 2014, hal. 25).

Artikel ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menempatkan perubahan fungsi hutan di Muaro Jambi sebagai bagian dari sejarah lingkungan daerah. Kajian ini tidak hanya melihat sawit sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai faktor yang mengubah lanskap hutan, pola penggunaan lahan, dan kehidupan masyarakat. Dengan memadukan data BPS Kabupaten Muaro Jambi, dokumen SESA Jambi, laporan Simamora, serta jurnal-jurnal tentang deforestasi, penggunaan lahan, dan perkebunan sawit, artikel ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam memahami hubungan antara pembangunan perkebunan

dan perubahan lingkungan di tingkat lokal.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2000–2020. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi awal hutan Muaro Jambi sebelum ekspansi sawit berlangsung luas, menjelaskan proses perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit, serta menganalisis dampak perubahan tersebut terhadap lingkungan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sejarah lingkungan dan sejarah sosial-ekonomi daerah, khususnya mengenai perubahan lanskap hutan di Kabupaten Muaro Jambi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas beberapa tahapan, yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pemilihan topik dilakukan dengan menentukan fokus kajian pada perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2000–2020. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, seperti data Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, dokumen SESA Jambi, laporan penelitian, jurnal ilmiah, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan hutan, deforestasi, penggunaan lahan, dan perkebunan sawit. Tahap verifikasi dilakukan melalui kritik sumber untuk menilai keaslian, kebenaran, dan kesesuaian data dengan topik penelitian. Setelah itu, tahap interpretasi dilakukan dengan menafsirkan fakta-fakta yang telah diperoleh untuk melihat hubungan antara kondisi awal hutan, proses perluasan perkebunan sawit, dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu menyusun hasil penelitian secara kronologis, sistematis, dan analitis dalam bentuk artikel ilmiah sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Awal Hutan di Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki wilayah cukup luas dan bentang alam yang beragam. Secara administratif, wilayah ini terdiri atas beberapa kecamatan yang memiliki karakter lahan berbeda, mulai dari daerah permukiman, pertanian, perkebunan, kawasan sungai, hingga kawasan hutan. Berdasarkan data BPS, luas Kabupaten Muaro Jambi mencapai 5.264 km², dengan Kecamatan Kumpeh sebagai kecamatan terluas, yaitu 1.658,93 km² atau 31,51 persen dari luas kabupaten (Rokhim et al., 2020, hal. 8–9). Kondisi geografis ini menunjukkan bahwa Muaro Jambi sejak awal memiliki ketersediaan lahan yang besar, sehingga wilayah ini menjadi ruang penting bagi kegiatan pertanian, kehutanan, dan perkebunan.

Pada awal tahun 2000-an, hutan masih menjadi bagian penting dari lanskap Kabupaten Muaro Jambi. Hutan di wilayah ini tidak hanya berupa kumpulan pepohonan, tetapi juga memiliki fungsi ekologis sebagai penjaga keseimbangan lingkungan. Penelitian Sari, Subiyanto, dan Awaluddin menjelaskan bahwa hutan berperan membentuk iklim mikro dan memiliki kondisi ekologis yang berbeda dari wilayah terbuka di sekitarnya (Sari et al., 2014, hal. 14). Dalam konteks Muaro Jambi, hutan memiliki keterkaitan dengan kawasan gambut, hutan produksi, hutan lindung, serta hutan sekunder yang tersebar di beberapa wilayah. Keberadaan hutan tersebut menjadi penting karena Muaro Jambi berada pada wilayah dataran rendah yang sebagian arealnya memiliki fungsi hidrologis.

Kondisi hutan Muaro Jambi pada awal 2000-an dapat dilihat dari masih tercatatnya aktivitas kehutanan dalam data resmi daerah. Dalam Muaro Jambi Dalam Angka 2006, produksi hutan jenis kayu rimba oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan masih tercatat pada periode 2002–2006. Produksi kayu rimba pada tahun 2002 sebesar 33.567,32 m³,

kemudian pada tahun 2006 tercatat sebesar 46.391,21 m³ (BPS Kabupaten Muara Jambi, 2006, hal. 171). Selain itu, BPS juga mencatat produksi hasil hutan seperti kayu bulat, kayu gergajian, dan getah-getahan pada periode yang sama (BPS Kabupaten Muara Jambi, 2006, hlm. 172). Data ini memperlihatkan bahwa sebelum perkebunan sawit berkembang semakin luas, hutan masih menjadi bagian dari kegiatan ekonomi daerah, terutama melalui pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan lainnya.

Selain memiliki nilai ekonomi, hutan di Muara Jambi juga memiliki fungsi lingkungan yang besar. Berdasarkan laporan moratorium Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2009 yang dikutip oleh Sari, Subiyanto, dan Awaluddin, luas wilayah hutan di Kabupaten Muara Jambi mencapai 136.976,70 hektar. Kawasan tersebut terdiri atas hutan lahan gambut, hutan lahan gambut terdegradasi, dan hutan sekunder. Hutan lahan gambut termasuk dalam kawasan hutan lindung gambut yang berfungsi sebagai penyeimbang tata air, sedangkan hutan sekunder terdiri atas hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, kawasan suaka alam, dan areal penggunaan lain (Sari et al., 2014, hal. 25). Kondisi ini menunjukkan bahwa hutan Muara Jambi tidak dapat dipandang sebagai lahan kosong, melainkan sebagai bagian penting dari sistem ekologis yang menjaga air, tanah, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, hutan memiliki hubungan erat dengan pola hidup dan mata pencaharian lokal. Sebelum perkebunan sawit berkembang secara luas, masyarakat Muara Jambi banyak bergantung pada sektor pertanian, perkebunan rakyat, dan pemanfaatan sumber daya alam sekitar. Karet menjadi salah satu komoditas penting masyarakat, sementara hutan menyediakan kayu, getah, dan sumber daya alam lain yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi maupun kehidupan sehari-hari. Dalam data BPS 2006, luas tanaman karet rakyat tercatat 77.263 hektar pada tahun 2006, sedangkan luas kelapa sawit tercatat 121.339 hektar, dengan catatan bahwa angka tersebut merupakan gabungan perkebunan rakyat dan perkebunan besar (BPS Kabupate Muara Jambi, 2006, hal. 168). Data ini menunjukkan bahwa sejak pertengahan 2000-an, kelapa sawit sudah mulai menempati posisi penting, tetapi karet dan hasil hutan masih menjadi bagian dari struktur ekonomi masyarakat.

Tanda-tanda awal tekanan terhadap hutan mulai terlihat ketika kegiatan perkebunan berkembang semakin kuat. Muara Jambi Dalam Angka 2006 menjelaskan bahwa perkebunan terbesar di Kabupaten Muara Jambi adalah perkebunan kelapa sawit (BPS Kabupaten Muara Jambi, 2006, hlm. 134). Hal serupa juga terlihat dalam Muara Jambi Dalam Angka 2007 yang kembali menempatkan kelapa sawit sebagai perkebunan terbesar di wilayah tersebut (Badan Pusat Statistik Muara Jambi, 2007, hal. 71). Perkembangan ini memperlihatkan bahwa pada awal 2000-an telah terjadi pergeseran orientasi penggunaan lahan. Lahan yang sebelumnya berkaitan dengan hutan, pertanian tradisional, atau perkebunan rakyat mulai diarahkan pada perkebunan sawit yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi.

Perubahan tersebut semakin tampak dalam penelitian deforestasi di Kabupaten Muara Jambi. Sari, Subiyanto, dan Awaluddin menyebutkan bahwa deforestasi di Provinsi Jambi paling parah terjadi di Kabupaten Muara Jambi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa deforestasi di Muara Jambi pada tahun 2005–2013 mencapai 9,6 persen atau 14.218,615 hektar, dan terjadi di beberapa kecamatan seperti Jambi Luar Kota, Bahar Selatan, Kumpeh, Kumpeh Ulu, Muaro Sebo, Taman Rajo, dan Sekernan (Sari et al., 2014, hal. 13). Dengan demikian, awal 2000-an dapat dipahami sebagai masa ketika hutan Muara Jambi masih cukup penting, tetapi tekanan terhadap hutan mulai meningkat melalui pembukaan lahan, perluasan perkebunan, pemukiman, dan perubahan penggunaan tanah.

Kondisi awal hutan di Kabupaten Muara Jambi menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara lingkungan, masyarakat, dan ekonomi lokal. Hutan berfungsi sebagai penyangga

tata air, penyedia sumber daya alam, ruang hidup masyarakat, sekaligus bagian dari ekonomi daerah. Namun, pada saat yang sama, perkembangan perkebunan sawit mulai menjadi faktor penting yang mengubah arah pemanfaatan lahan. Nursanti, Fazriyas, Albayudi, dan Wulan menjelaskan bahwa pengembangan areal perkebunan kelapa sawit dari tahun ke tahun telah menyebabkan keberadaan hutan di Muaro Jambi semakin terancam (Nursanti et al., 2017, hal. 20). Oleh karena itu, pembahasan mengenai kondisi awal hutan ini menjadi dasar untuk memahami proses berikutnya, yaitu perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2000–2020. Rujukan file yang digunakan: BPS Muaro Jambi 2006, BPS Muaro Jambi 2007, BPS Muaro Jambi 2020, Statistik Daerah Muaro Jambi 2023, SESA Jambi, jurnal deforestasi Muaro Jambi, dan jurnal agroforestri sawit Muaro Jambi.

B. Proses Perubahan Fungsi Hutan 2000–2020

Proses perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan terjadi secara bertahap sejak awal tahun 2000-an. Perubahan ini berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk kegiatan ekonomi, terutama perkebunan. Pada tingkat Provinsi Jambi, tekanan terhadap hutan banyak dipengaruhi oleh perluasan perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, pertambangan, pembukaan lahan masyarakat, serta kebakaran hutan dan lahan (Pemerintah Provinsi Jambi, 2022, hal. 3). Dalam konteks Muaro Jambi, perubahan tersebut terlihat dari semakin luasnya areal perkebunan, sementara kawasan hutan mengalami penurunan dari waktu ke waktu.

Pada awal 2000-an, kelapa sawit mulai menunjukkan posisi penting dalam struktur perkebunan Kabupaten Muaro Jambi. Data BPS menunjukkan bahwa luas areal kelapa sawit meningkat dari 68.488 hektar pada tahun 2002 menjadi 121.339 hektar pada tahun 2006. Angka tahun 2006 tersebut merupakan gabungan antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar (BPS Kabupaten Muaro Jambi, 2006, hal. 168). Peningkatan ini menunjukkan bahwa sawit telah berkembang menjadi komoditas utama yang mendorong perubahan penggunaan lahan. Pada saat yang sama, BPS juga menjelaskan bahwa perkebunan terbesar di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2006 adalah kelapa sawit, sehingga dapat dipahami bahwa sejak pertengahan 2000-an sawit sudah menjadi kekuatan utama dalam pemanfaatan lahan daerah (BPS Kabupaten Muaro Jambi, 2006, hal. 134).

Perubahan fungsi hutan pada periode awal juga dapat dilihat melalui hasil penelitian deforestasi menggunakan citra satelit. Sari, Subiyanto, dan Awaluddin mencatat bahwa pada tahun 2005 luas wilayah hutan di Kabupaten Muaro Jambi masih sekitar 144.816,379 hektar. Luas tersebut kemudian menurun menjadi 142.619,012 hektar pada 2007, 138.096,740 hektar pada 2008, 136.966,792 hektar pada 2009, dan 134.980,069 hektar pada 2013 (Sari et al., 2014, hal. 25). Penurunan ini menunjukkan bahwa sepanjang 2005–2013 terjadi pergeseran tutupan lahan dari hutan menuju non-hutan. Wilayah non-hutan justru meningkat dari 381.969,321 hektar pada tahun 2005 menjadi 391.801,384 hektar pada tahun 2013 (Sari et al., 2014, hal. 25).

Pola perubahan tersebut memperlihatkan bahwa hutan Muaro Jambi terus mengalami tekanan, sementara lahan non-hutan semakin meluas. Dalam penelitian yang sama, wilayah perkebunan rakyat menjadi jenis penggunaan lahan yang paling luas dibandingkan tutupan lahan lainnya. Pada tahun 2007, luas perkebunan rakyat mencapai 270.950,107 hektar, kemudian meningkat menjadi 280.756,204 hektar pada 2008, dan mencapai 281.460,477 hektar pada 2013 (Sari et al., 2014, hal. 20–24). Walaupun kategori tersebut tidak seluruhnya berarti kelapa sawit, data ini menunjukkan arah umum perubahan lahan di Muaro Jambi, yaitu dari kawasan berhutan menuju kawasan budidaya dan perkebunan.

Perubahan fungsi hutan juga terjadi pada kawasan hutan gambut. Hutan lahan gambut

di Muaro Jambi menurun dari 64.059,437 hektar pada tahun 2007 menjadi 55.135,420 hektar pada tahun 2013 (Sari et al., 2014, hal. 20–24). Penurunan hutan gambut penting diperhatikan karena wilayah gambut memiliki fungsi ekologis sebagai penyimpan air dan karbon. Kajian Afriyanti dkk. menjelaskan bahwa sejak tahun 2000 perkebunan sawit di lahan gambut Jambi meningkat karena lahan mineral semakin terbatas. Dalam kajian tersebut, Muaro Jambi termasuk salah satu dari tiga wilayah utama kajian gambut di Jambi bersama Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, dengan karakter perkebunan sawit di Muaro Jambi yang lebih banyak dikelola perusahaan swasta (Afriyanti et al., 2019, hal. 1203). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan fungsi hutan di Muaro Jambi tidak hanya terjadi di tanah mineral, tetapi juga mulai menyentuh wilayah gambut yang secara ekologis lebih rentan.

Pada periode 2010-an, perubahan fungsi hutan semakin berkaitan dengan perluasan industri perkebunan sawit. Nursanti dkk. menjelaskan bahwa pada tahun 2015 luas areal kelapa sawit di Provinsi Jambi mencapai 559.697 hektar dengan produksi 1.963.197 ton. Perkembangan sawit tersebut didukung oleh meningkatnya konversi hutan menjadi kebun kelapa sawit di Jambi (Nursanti et al., 2017, hal. 18–19). Dalam konteks Muaro Jambi, penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa dari seluruh perkebunan sawit di Provinsi Jambi, sebagian besar berada di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu sekitar 130.260 hektar, dan 90.305 hektar di antaranya merupakan perkebunan rakyat (Nursanti et al., 2017, hal. 20). Data ini memperkuat bahwa Muaro Jambi merupakan salah satu pusat penting perkembangan sawit di Provinsi Jambi.

Menjelang tahun 2020, perkebunan sawit tetap menjadi komoditas dominan dalam penggunaan lahan perkebunan di Kabupaten Muaro Jambi. Dalam Kabupaten Muaro Jambi Dalam Angka 2020, luas areal kelapa sawit pada tahun 2019 tercatat 115.617 hektar, dengan kecamatan yang memiliki areal sawit terbesar adalah Sekernan seluas 25.474 hektar dan Sungai Bahar seluas 22.746 hektar (Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, 2020, hal. 141). Produksi kelapa sawit Muaro Jambi pada tahun 2019 tercatat 232.725 ton, dengan produksi terbesar berada di Sekernan sebesar 58.010 ton, Kumpeh Ulu sebesar 42.542 ton, dan Sungai Bahar sebesar 33.689 ton (Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, 2020, hal. 144). Data ini menunjukkan bahwa sampai akhir periode penelitian, sawit tetap menjadi salah satu bentuk penggunaan lahan paling penting di Muaro Jambi.

Dengan demikian, proses perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Muaro Jambi berlangsung melalui beberapa tahap. Tahap awal ditandai oleh perluasan perkebunan sejak awal 2000-an. Tahap berikutnya terlihat dari penurunan luas hutan dan peningkatan wilayah non-hutan pada 2005–2013. Tahap selanjutnya berlangsung pada 2010-an ketika sawit semakin kuat sebagai komoditas utama, baik melalui perkebunan rakyat maupun perusahaan. Proses ini menunjukkan bahwa perubahan fungsi hutan di Muaro Jambi bukan hanya perubahan fisik tutupan lahan, tetapi juga perubahan orientasi ekonomi masyarakat dan daerah dari hutan sebagai ruang ekologis menuju perkebunan sebagai ruang produksi.

C. Dampak Perubahan Fungsi Hutan

Perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi membawa dampak yang luas, baik terhadap lingkungan, ekonomi, maupun kehidupan sosial masyarakat. Dampak tersebut tidak dapat dilihat hanya sebagai perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi kebun, tetapi juga sebagai perubahan fungsi ruang. Hutan yang sebelumnya berperan sebagai penyangga ekologis, sumber hasil hutan, pelindung tata air, dan bagian dari kehidupan masyarakat, secara bertahap berubah menjadi ruang produksi komoditas perkebunan. Perubahan ini sejalan dengan kondisi Provinsi Jambi secara umum, yaitu hilangnya sebagian tutupan hutan akibat perluasan perkebunan sawit, hutan tanaman

industri, pertambangan, dan penggunaan lahan lainnya (Pemerintah Provinsi Jambi, 2022, hal. 3).

Dampak lingkungan yang paling terlihat adalah berkurangnya tutupan hutan. Penelitian Sari, Subiyanto, dan Awaluddin menunjukkan bahwa luas hutan di Kabupaten Muaro Jambi mengalami penurunan dari sekitar 144.816,379 hektar pada tahun 2005 menjadi 134.980,069 hektar pada tahun 2013. Pada periode tersebut, deforestasi di Muaro Jambi mencapai sekitar 14.218,615 hektar atau 9,6 persen (Sari et al., 2014, hal. 25). Penurunan ini menunjukkan bahwa perubahan fungsi hutan berlangsung cukup nyata, terutama ketika kawasan berhutan berubah menjadi lahan non-hutan seperti perkebunan, pemukiman, dan penggunaan lain. Berkurangnya tutupan hutan juga berarti berkurangnya fungsi hutan sebagai pelindung tanah, penyerap air, penyimpan karbon, dan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna.

Perubahan fungsi hutan juga berdampak pada sistem tata air. Hutan, terutama hutan gambut, memiliki fungsi penting dalam menyimpan air dan menjaga kelembaban tanah. Ketika kawasan hutan dibuka untuk perkebunan, daya serap air tanah dapat menurun sehingga wilayah sekitar lebih rentan mengalami kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan. Dalam konteks Jambi, alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit sering dikaitkan dengan persoalan lingkungan seperti kekeringan, banjir, dan menurunnya kualitas sumber daya alam (Fatimah Azzahra, Arya Hadi Dharmawan, 2022, hal. 87–88). Kondisi ini menjadi penting bagi Muaro Jambi karena sebagian wilayahnya merupakan dataran rendah dan memiliki kawasan gambut yang sensitif terhadap perubahan tata air.

Dampak lain yang muncul adalah menurunnya kualitas lingkungan sekitar masyarakat. Sungai Batanghari dan anak-anak sungainya sejak lama memiliki fungsi penting bagi masyarakat Muaro Jambi, baik sebagai jalur transportasi, sumber air, tempat menangkap ikan, maupun bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat (Simamora, 2007, hal. 8–11). Ketika kawasan hutan dan lahan di sekitar sungai berubah menjadi perkebunan atau kawasan produksi lain, hubungan masyarakat dengan sungai juga ikut berubah. Penelitian Utami, Putri, dan Ekayani di wilayah Jambi menunjukkan bahwa ekspansi sawit dapat menimbulkan dampak lingkungan berupa berkurangnya kuantitas air tanah, pencemaran air, dan menurunnya populasi satwa (Utami et al., 2017, hal. 115). Meskipun penelitian tersebut dilakukan di Tanjung Jabung Barat, temuannya dapat digunakan sebagai pembandingan untuk memahami pola dampak lingkungan ekspansi sawit di wilayah Jambi.

Namun, perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kelapa sawit menjadi komoditas yang dianggap lebih menguntungkan dibandingkan beberapa komoditas lain karena memiliki pasar yang luas dan hasil panen yang relatif teratur. Di Muaro Jambi, sawit berkembang melalui perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta, perkebunan inti rakyat, dan pola kemitraan. Simamora menjelaskan bahwa karet sudah lama menjadi andalan ekonomi penduduk Muaro Jambi, tetapi sejak kelapa sawit berkembang, banyak masyarakat mulai beralih menjadi petani sawit (Simamora, 2007, hal. 16–17). Data BPS juga menunjukkan bahwa pada tahun 2019 luas areal kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 115.617 hektar dengan produksi 232.725 ton (Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, 2020, Hal. 141–144). Data ini memperlihatkan bahwa sawit telah menjadi salah satu komoditas penting dalam ekonomi daerah.

Perubahan ekonomi tersebut berdampak pada pola mata pencaharian masyarakat. Sebelum sawit berkembang luas, masyarakat Muaro Jambi banyak bertumpu pada pertanian, karet, perikanan sungai, hasil hutan, serta kebun buah-buahan seperti duku dan nanas. Setelah sawit berkembang, sebagian masyarakat mulai mengubah kebun karet, lahan

kosong, atau lahan pertanian menjadi kebun sawit. Perubahan ini terjadi karena sawit dianggap lebih praktis dan memberikan keuntungan ekonomi lebih besar. Penelitian Utami, Putri, dan Ekayani menunjukkan bahwa konversi kebun karet menjadi sawit dapat meningkatkan pendapatan petani, tetapi peningkatan ekonomi tersebut juga diikuti oleh dampak lingkungan (Utami et al., 2017, hal. 115-121). Dengan demikian, sawit menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi sekaligus menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap satu komoditas perkebunan.

Secara sosial, perubahan fungsi hutan juga mengubah hubungan masyarakat dengan lahan. Hutan dan kebun campuran sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat karena di dalamnya terdapat kerja bersama, pemanfaatan sumber daya alam, dan hubungan ekonomi yang lebih beragam. Ketika sawit berkembang, pola pengelolaan lahan menjadi lebih individual dan berorientasi pasar. Azzahra, Dharmawan, dan Pandjaitan menjelaskan bahwa ekspansi sawit di Jambi dapat menyebabkan perubahan rasionalitas masyarakat dari rasionalitas moral menuju rasionalitas formal, yaitu masyarakat semakin mempertimbangkan pilihan ekonomi berdasarkan keuntungan dan efisiensi (Fatimah Azzahra, Arya Hadi Dharmawan, 2022, hal. 87–92). Perubahan ini menunjukkan bahwa sawit bukan hanya mengubah bentuk lahan, tetapi juga cara masyarakat memandang tanah, kerja, dan sumber penghidupan.

Dampak sosial lainnya adalah munculnya potensi konflik lahan. Perluasan perkebunan sawit sering berkaitan dengan persoalan batas lahan, hak guna usaha, klaim masyarakat, lahan adat, serta tumpang tindih antara kawasan hutan dan penggunaan lahan lain. Dalam dokumen SESA Jambi dijelaskan bahwa persoalan tenurial dan konflik sumber daya alam menjadi salah satu isu penting dalam pengelolaan lanskap Jam (Pemerintah Provinsi Jambi, 2022, hal. 99–108). Kajian Rokhim dkk. juga menunjukkan bahwa peningkatan perkebunan dan industri sawit di Jambi dapat menimbulkan persoalan sosial dan lingkungan yang memicu konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal (Rokhim et al., 2020, hal. 1–3). Dalam konteks Muaro Jambi, potensi konflik ini penting diperhatikan karena sawit berkembang melalui berbagai pola, baik perkebunan rakyat, perusahaan swasta, maupun kemitraan.

Dengan demikian, dampak perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Muaro Jambi bersifat ganda. Di satu sisi, sawit memberikan peluang ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan sebagian petani, dan memperkuat sektor perkebunan daerah. Di sisi lain, perubahan tersebut menyebabkan berkurangnya tutupan hutan, terganggunya fungsi tata air, menurunnya kualitas lingkungan, melemahnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam, serta munculnya potensi konflik lahan. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa perubahan fungsi hutan di Muaro Jambi bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga bagian dari perubahan sosial-ekonomi masyarakat sejak tahun 2000 hingga 2020.

KESIMPULAN

Perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2000–2020 merupakan proses yang berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, perluasan perkebunan, serta perubahan orientasi pemanfaatan lahan. Pada awalnya, hutan di Muaro Jambi memiliki fungsi penting sebagai penyangga lingkungan, pengatur tata air, sumber hasil hutan, serta bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Masyarakat masih banyak bergantung pada sektor pertanian, perkebunan karet, hasil hutan, dan sumber daya sungai sebelum kelapa sawit berkembang luas. Memasuki tahun 2000-an, perkebunan kelapa sawit mulai berkembang pesat dan menjadi salah satu komoditas utama di Kabupaten Muaro Jambi. Perluasan sawit menyebabkan sebagian

kawasan hutan, lahan gambut, kebun karet, dan lahan masyarakat berubah menjadi areal perkebunan. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi lahan, dari hutan sebagai ruang ekologis dan sumber penghidupan tradisional menjadi perkebunan sebagai ruang produksi ekonomi. Sawit memang memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat, terutama dalam bentuk peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan berkembangnya sektor perkebunan. Namun, perubahan fungsi hutan tersebut juga menimbulkan berbagai dampak lingkungan dan sosial. Berkurangnya tutupan hutan menyebabkan terganggunya fungsi tata air, meningkatnya risiko banjir dan kekeringan, menurunnya kualitas lingkungan, serta berkurangnya keanekaragaman hayati. Secara sosial, perkembangan sawit turut mengubah pola mata pencaharian, hubungan masyarakat dengan lahan, dan orientasi ekonomi masyarakat yang semakin bergantung pada komoditas sawit. Dengan demikian, perubahan fungsi hutan di Kabupaten Muaro Jambi tidak hanya menggambarkan perubahan tutupan lahan, tetapi juga menunjukkan perubahan besar dalam hubungan antara masyarakat, ekonomi, dan lingkungan selama periode 2000–2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, D., Hein, L., Kroeze, C., Zuhdi, M., & Saad, A. (2019). Scenarios for withdrawal of oil palm plantations from peatlands in Jambi Province , Sumatra , Indonesia. *Region Environmental Change*, 19, 1201–1215. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10113-018-1452-1>
- BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MUARO JAMBI. (2020). Kabupaten muaro jambi dalam angka 2020.
- BADAN PUSAT STATISTIK MUARO JAMBI. (2007). MUARO JAMBI DALAM ANGKA 2007.
- Fatimah Azzahra, Arya Hadi Dharmawan, N. K. P. (2022). RESILIENSI NAFKAH DAN PERUBAHAN RASIONALITAS RUMAH TANGGA PETANI SAWIT: ANALISIS DAMPAK EKSPANSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI JAMBI. *Jurnal Agrimanex*, 3(1), 87–96.
- Jambi, B. pusat statistik kabupaten muaro. (2006). Muara Jambi Dalam Angka 2006 (Nomor 1403).
- Nursanti, F., Albayudi, & Wulan, C. (2017). AGROFORESTRI TEMBESU (*Fagraea fragrans*) BERBASIS KELAPA SAWIT DI KABUPATEN MUARO JAMBI. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 1(1), 18–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jkam.v1i1.3724>
- Pahmi, P., Gunawan, B., Iskandar, J., & Soemarwoto, R. (2023). Reverse Social Impact of Oil Palm Plantation Expansion : A Study of Three Communities in Jambi , Indonesia. *Forest and Society*, 7(April), 61–75. <https://doi.org/10.24259/fs.v7i1.24803>
- PEMERINTAH PROVINSI JAMBI. (2022). STRATEGIC ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ASSESSMENT (SESA) JAMBI SUSTAINABLE LANDSCAPE MANAGEMENT PROGRAM (J-SLMP) - INDONESIA BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes. <https://share.google/Hos1ldzd8rMafqdRz>
- Rokhim, R., Januari, A. D., Atik, U., Shara, S., & Rusdayanti, N. (2020). Palm oil social conflict resolution and mediation in Jambi Palm oil social conflict resolution and mediation in Jambi. *Cogent Social Sciences*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1812831>
- Sari, C. P., Subiyanto, S., & Awaluddin, M. (2014). ANALISIS DEFORESTASI HUTAN DI PROVINSI JAMBI MENGGUNAKAN METODE PENGINDERAAN JAUH (Studi Kasus Kabupaten Muaro Jambi). *Jurnal Geodesi Undip*, 3, 13–27.
- Simamora, P. (2007). Dampak Perkebunan Sawit Terhadap Masyarakat di Kabupaten Muara Jambi Propinsi Jambi.
- Ummu Ma'rufah, Tania June, Akhmad Faqih, Yonny Koesmaryono, Ashehad Ashween Ali, A. K. (2023). Projection of further expansion of oil palm plantation in Jambi Province. *Journal of Natural Resources and Environmental Managemen*, 13(3), 484–493.
- Utami, R., Intan, E., Putri, K., & Ekayani, M. (2017). Dampak Ekonomi dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus : Desa Penyabungan , Kecamatan Merlung ,

Kabupaten Tanjung Jabung Barat , Jambi) (Economy and Environmental Impact of Oil Palm Palm Plantation Expansion (Case Study : Panyabun. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI), 22(2), 115–126. <https://doi.org/10.18343/jipi.22.2.115>